

BAB II

BANTUAN PEMBANGUNAN KANADA DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP INDONESIA

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan sejarah bantuan pembangunan Kanada yang merupakan awal dari bantuan asing Kanada berfokus pada bantuan pembangunan ke negara-negara lain. Lembaga yang mengelola bantuan pembangunan Kanada pada setiap periode yakni *Canadian International Development Assistance* (CIDA). Selain itu, penulis akan menjelaskan tentang implementasi bantuan pembangunan Kanada ke negara lain, yang dalam tesis ini difokuskan pada Indonesia.

A. Latar Belakang Bantuan Pembangunan Kanada

Dengan perluasan bantuan Pembangunan Kanada sejak akhir Perang Dunia II, kebutuhan akan kebijakan bantuan yang jelas ditetapkan. Pemerintah Kanada menemukan bahwa ada kebutuhan untuk dapat memperhitungkan bantuan pembangunan ke satu negara dan bukan ke yang lain. Dengan menguraikan kriteria untuk bantuan pembangunan, Kanada juga akan dapat menjelaskan tingkat bantuan yang berbeda pada waktu yang berbeda. Kepentingan kemanusiaan sering kali memperkenalkan negara donor kepada kebutuhan negara penerima. Tersirat dalam motif ini adalah bahwa bantuan diberikan secara bebas tanpa ikatan untuk membantu negara lain. Kedua, kepentingan ekonomi mungkin merupakan faktor pendorong dalam memiliki program bantuan. Sebagai kekuatan menengah, Kanada bergantung pada perdagangan untuk kesejahteraan ekonominya sendiri. Banyak negara berkembang telah dianggap kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan oleh Kanada dan negara maju lainnya. Bantuan dapat dipertukarkan dengan imbalan sumber daya ini. Ketiga, bantuan disediakan untuk kepentingan politik atau keamanan. Alih-alih memberikan kekuatan bermusuhan,

kesempatan untuk memperluas bantuan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi negara-negara Dunia Ketiga, pemerintah Kanada memilih untuk memberikan bantuan. (Weert, 1979)

Minat Kanada dalam memberikan bantuan pembangunan atau bantuan asing awalnya berasal dari keinginan untuk membantu negara-negara Eropa membangun kembali diri mereka sendiri secara ekonomi setelah Perang Dunia II. Kanada dan Amerika Serikat adalah satu-satunya dua negara yang muncul dari perang dengan ekonomi 1 yang sebenarnya telah diperkuat. Akibatnya, pemerintah Kanada memutuskan untuk memberikan bantuan kepada negara-negara dimana Kanada merasakan ikatan emosional dengan, misalnya, Inggris Raya. Karena bantuan pembangunan Kanada pada hari-hari pasca-Perang Dunia II diarahkan pada rekonstruksi Eropa, bantuan untuk negara-negara Dunia Ketiga yang baru merdeka tidak dimulai sampai akhir 1940-an dan awal 1950-an. Perserikatan Bangsa-Bangsa meluncurkan program bantuan teknis di mana Kanada berpartisipasi. Program Bantuan Teknis PBB yang diperluas mengadakan pertemuan di Ottawa. (Weert, 1979)

Badan bantuan pembangunan Pemerintah Kanada, *Canadian International Development Agency* (CIDA) mendukung pembangunan berkelanjutan di seluruh dunia untuk mengurangi kemiskinan dan memastikan kontribusi Kanada terhadap dunia yang aman dan makmur. CIDA didirikan pada tahun 1968 untuk mengelola sebagian besar program bantuan pembangunan resmi Kanada. (WHO, 2019) Secara khusus, CIDA memiliki mandat untuk “memajukan nilai-nilai Kanada tentang kewarganegaraan global, keadilan, dan kelestarian lingkungan, serta kepentingan Kanada terkait keamanan, kemakmuran, dan tata kelola; memberikan dampak yang terlihat dan tahan lama pada tantangan pembangunan utama dunia seperti yang

diidentifikasi dalam *Millennium Development Goals* (MDGs); fokus pada pengurangan kemiskinan melalui pendekatan yang efektif dan terfokus yang akan mencocokkan ceruk Kanada dengan kebutuhan negara-negara berkembang dalam koordinasi dengan donor lain; mengenali dan mempromosikan solusi berkelanjutan untuk mengatasi hubungan kritis antara degradasi lingkungan, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial; dan memobilisasi warga Kanada untuk membangun kapasitas masyarakat kita untuk berkontribusi secara efektif dalam pengurangan kemiskinan global. (fundsforngos)

Pada tahun 1949 kontribusi Kanada pertama pada *UN Expanded Program of Technical Assistance*. Ditahun selanjutnya Kanada bergabung dengan *Colombo Plan for Co-operative Economic Development in South and Southeast Asia*; India, Pakistan, dan Ceylon menjadi penerima utama bantuan bilateral berdasarkan Colombo Plan. Layanan Kerjasama Teknis (TCS) didirikan di *Department of Trade and Commerce*. *International Economic and Technical Cooperation Division* (IETCD) didirikan di departemen tersebut. Pada tahun 1958 IETCD ditingkatkan sebagai *Economic and Technical Assistance Branch* (ETAB). Program Bantuan Hindia Barat dan Program Bantuan Teknis Persemakmuran (untuk negara-negara Afrika Persemakmuran) dimulai.

Pada tahun 1960 memasuki UN Development Decade; Negara-negara industri mendesak untuk mentransfer 1 persen dari pendapatan nasional gabungan mereka ke negara-negara berkembang. Kanada bergabung dengan *Development Assistance Group of the Organization for European Economic Co-operation*, dibentuk kembali sebagai *Development Assistance Committee* (DAC) dari *Organisation for Economic Co-operation and*

Development (OECD) pada tahun 1961. ETAB digantikan oleh *External Aid Office* (EAO). Pemrograman bantuan bilateral penuh diperluas ke negara-negara Afrika Persemakmuran di bawah *Special Commonwealth Africa Aid programme* (SCAAP). Kanada terlibat dalam *International Development Association* (IDA), yang dibentuk sebagai lengan pinjaman lunak Bank Dunia.

Program bantuan teknis sederhana dimulai di Afrika Perancis pada tahun 1961; bantuan modal diperpanjang pada tahun 1964. Pada tahun 1962 Kanada mendukung pembentukan *World Food Program*. Di bawah pemerintah Liberal yang baru terpilih yakni Lester Pearson mengumumkan peningkatan besar dalam upaya bantuan Kanada, yang melibatkan program pinjaman lunak baru. Bantuan Kanada pertama ke Amerika Latin melalui program pinjaman yang dikelola *Inter-American Development Bank* (IDB).

Pada tahun 1968 Pemerintah Perdana Menteri Liberal baru yang dipimpin Pierre Trudeau meningkatkan EAO ke *Canadian International Development Agency* (CIDA), dengan Maurice Strong sebagai presiden pertama, melapor kepada sekretaris negara untuk Urusan Eksternal. Misi bantuan pemerintah Kanada untuk francophone Afrika, dipimpin oleh Lionel Chevrier, bagian dari upaya besar untuk menggunakan bantuan untuk mendukung posisi Ottawa mengenai ambisi Quebec untuk pengakuan internasional. *Canadian Council for International Cooperation* (CCIC) dibentuk sebagai organisasi payung yang mewakili LSM.

Laporan Kanada tentang Pembangunan Internasional, diketuai oleh mantan Perdana Menteri Pearson pada tahun 1969, mendesak donor DAC untuk berkontribusi 0,7 persen dari GNP kepada ODA paling

lambat tahun 1980. CIDA menyusun Program Bisnis dan Industri. Pernyataan kebijakan bantuan pemerintah Kanada pertama, Pembangunan Internasional, berdasarkan ulasan yang dipimpin oleh CID dan diterbitkan sebagai salah satu dari enam buklet yang muncul dari tinjauan kebijakan luar negeri pemerintah Trudeau. CIDA mendirikan Program Pendidikan Pembangunan, cikal bakal *Public Participation Program* (PPP). CIDA menyiapkan proses Internasional, kabinet menyetujui *Strategy for International Development Cooperation 1975-1980*. Rasio ODA / GNP Kanada mencapai 0,53 persen pada 1975-76 (0,55 pada tahun kalender 1975), level tertinggi yang pernah ada.

Pada tahun 1984 CIDA mendirikan *Business Cooperation Branch*. Penunjukan Koordinator Darurat Kanada / Kelaparan Afrika untuk mengawasi respons Kanada terhadap kelaparan parah di Ethiopia dan bagian lain di Afrika sub-Sahara. Persetujuan Kerangka Kebijakan *WID (Women in Development)*. Tahun 1995 publikasi Kanada di dunia, kebijakan luar negeri pemerintah Liberal Jean Chretien, termasuk pernyataan baru mengenai kebijakan bantuan. Transfer tanggung jawab pemrograman untuk dukungan non-ODA ke Eropa Timur dan Tengah dan bekas Uni Soviet ke CIDA dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Internasional. Pemotongan dalam anggaran bantuan dan proyeksi penurunan rasio ODA / GNP ke level terendah sejak 1960-an; penghapusan beberapa program, termasuk Program Partisipasi Publik CIDA. Rilis kebijakan baru CIDA tentang pengentasan kemiskinan dan dokumen kebijakan lainnya. (Morrison, 1998)

Pembentukan *Canadian International Development Agency* (CIDA) pada tahun 1968 melambangkan komitmen yang mengarah pada perluasan program bantuan ke sebagian besar negara berkembang,

menjadikan Kanada salah satu donor yang lebih dermawan di antara negara-negara industri. Sebagai persentase dari produk nasional bruto (GNP), alokasi ODA mencapai puncaknya pada tahun 1975, jatuh, dan kemudian naik lagi pada tahun 1980-an di tengah perubahan gagasan tentang pengembangan dan serangan berkala dari banyaknya bantuan yang dilakukan. Terjadi penurunan drastis sejak 1989, didorong oleh tekanan langsung untuk mengurangi defisit federal, dan oleh perubahan dalam tatanan dunia yang ditransformasikan oleh jatuhnya komunisme, kebangkitan pasar global dan konflik etnis, dan naiknya neo-liberal ideologi.

Dalam kasus adanya bantuan pembangunan yang berikan oleh Kanada kepada Indonesia yakni dapat dilihat dari perubahan pandangan terhadap masa depan Asia dimata Kanada. Hasil pemikiran ulang di Ottawa adalah enam buklet yang ditetapkan Kebijakan Luar Negeri untuk Kanada. Di sini pemerintah Pierre Trudeau menetapkan agenda untuk Kanada sebagai "*Pacific power*.". Pierre Trudeau bertujuan "*to elevate the Third World to a position of central concern and major prominence*" dalam kebijakan luar negeri Kanada, ia dan penasihat kebijakan luar negerinya, Ivan Head kemudian. menulis Pada tahun 1970, ia menyatakan bahwa di masa depan, "negara-negara Pasifik akan disebut bukan sebagai Timur Jauh, tetapi sebagai Barat Baru kita." Simbol besar minat Kanada di Asia adalah pengakuan Republik Rakyat Cina pada tahun 1970. Itu seharusnya mengarah pada keterlibatan baru dengan seluruh Lingkar Pasifik. Sebuah misi ke negara-negara Pasifik pada tahun 1969 sebagian bertujuan untuk meyakinkan pemerintah Asia bahwa tawaran ke China "tidak dengan cara apa pun menyiratkan berkurangnya minat Kanada di negara-negara Asia lainnya ... Perubahan kebijakan kita tentang Cina, memang, dapat dipertimbangkan sebagai hanya

satu aspek dari intensifikasi umum dari minat kita dan hubungan dengan negara-negara Asia dan Pasifik. "Seorang perwira layanan asing kemudian menjelaskan kepada mitra Indonesia bahwa Kanada mengikuti" kebijakan sadar - langka untuk Kanada di Asia - di mana Kanada ingin membawa China keluar dari keterasingan, memperluas hubungan Kanada dengan Jepang, dan mempromosikan stabilitas di seluruh ASEAN. (Webster, Fire and the Full Moon: Canada and Indonesia in a Decolonizing World, 2010)

Tidak akan ada komitmen militer di Asia, tetapi penekanan baru diberikan pada bantuan dan hubungan pembangunan. Ekspansi kedua jenis koneksi ekonomi membuka jalan bagi peningkatan minat Kanada di Asia. Secara umum, Kanada lebih memperhatikan dunia berkembang, menggunakan *Canadian International Development Agency* (CIDA), yang didirikan pada tahun 1968, untuk menggantikan External Aid Office lama yang bertempat di External Affairs. CIDA seharusnya menandai pergeseran dari bantuan "pemberian" menjadi kemitraan, termasuk dukungan Kanada untuk persyaratan perdagangan yang lebih baik untuk negara-negara berkembang. Pemerintah juga menargetkan Asia untuk perdagangan. (Webster, Fire and the Full Moon: Canada and Indonesia in a Decolonizing World, 2010)

B. Implementasi Bantuan Pembangunan Kanada terhadap Indonesia sebelum tahun 2014

Indonesia adalah salah satu negara berkembang di Asia Pasifik yang menerima bantuan pembangunan Kanada. Kanada telah memiliki fokus dengan memilih aspek pembangunan dalam memberikan bantuan asing sejak 1950-an, pelaksanaan bantuan pembangunan di Indonesia dimulai pada 1950-an hingga sekarang. Karenanya, akan dijelaskan di bawah mana

implementasi pertama di abad ke-20 dan berlanjut hingga abad ke-21. Dalam bantuan pembangunan yang diberikan oleh Kanada kepada Indonesia memiliki beberapa kemungkinan yang dilatarbelakangi oleh kemanusiaan dan ekonomi, hal ini mencerminkan bahwa kepentingan politik mendominasi dalam keputusan pemerintah Kanada untuk memiliki program bantuan dengan Indonesia. Ketika kepentingan politik meningkat, bantuan yang diberikan meningkat.

Hubungan diplomatik Indonesia-Kanada secara resmi dimulai ketika kedua negara menandatangani perjanjian untuk membuka misi diplomatik di ibukota masing-masing pada tanggal 9 Oktober 1952. Namun, hubungan antara kedua negara dimulai pada tahun 1948, selama perjuangan Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya dari bekas kekuasaan kolonialnya pada tahun 1945.

Kanada, melalui Jenderal Andrew McNaughton sebagai Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, membantu memecah kebuntuan dalam negosiasi penyelesaian konflik antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan adopsi Resolusi 67/1949, yang mendukung pembentukan Komisi Tripartit untuk mengadakan negosiasi dengan Indonesia dan Belanda. Negosiasi Tripartit mengarah pada pengakuan internasional atas kedaulatan Indonesia pada bulan Desember 1949. Pada tahap awal kemerdekaan Indonesia, Kanada juga mendukung pengembangan upaya pembangunan Indonesia melalui Colombo Plan selama 1950-an. (Embassy of The Republic of Indonesia, 2018) Baik pembuat kebijakan Kanada maupun Indonesia menggunakan gambaran jembatan untuk menjelaskan apa yang mereka harapkan untuk dicapai melalui bantuan pembangunan. Kanada menggambarkan Colombo Plan sebagai jembatan antara Barat dan Asia, yang mampu membangun masyarakat

yang kuat dalam citra model pembangunan Barat dan dengan demikian memastikan hubungan yang berkelanjutan di era pasca-kolonial.

Pertimbangan bantuan untuk Indonesia adalah bagian dari perencanaan bantuan untuk negara-negara non-masyarakat, yang sebelumnya telah diberi sedikit perhatian dalam Colombo plan Kanada. Pada tahun 1957, para pejabat bantuan siap untuk merekomendasikan masing-masing \$ 600.000 untuk Indonesia dan Burma, dengan \$ 50.000 lagi untuk Kamboja. Dari hibah ke Indonesia, mereka mengusulkan \$ 250.000 untuk bandara Jakarta dan \$ 350.000 untuk peralatan pembangunan jalan Sulawesi.

Pada kenyataannya, bantuan Kanada untuk Indonesia pada awalnya terbatas pada pelatihan teknis. Pada tahun-tahun awal program, orang Indonesia menempati urutan kedua setelah siswa India di antara mereka yang datang ke Kanada untuk belajar. Sejumlah pakar Kanada pergi ke Indonesia berdasarkan Colombo Plan. Kelompok terbesar membantu staf Akademi Udara Sipil Indonesia, dibuka pada tahun 1952 oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) yang berbasis di Montreal. Ottawa mempertimbangkan untuk mendanai survei udara sumber daya alam Indonesia dan juga sekolah sains, tetapi satu-satunya proyek bantuan modal pada tahun 1957 adalah \$ 400 yang dianggarkan untuk membeli buku-buku teknis untuk pabrik semen.

Bantuan Kanada untuk Indonesia dari pembentukan Colombo Plan pada tahun 1950 hingga jatuhnya Sukarno pada tahun 1965 berjumlah \$ 5.216.000, kurang dari 1 persen dari total bantuan bilateral Kanada untuk Negara-negara Asia. Itu hampir seluruhnya datang dalam bentuk bantuan makanan dan pelatihan teknis di Kanada. Lebih dari 97 persen bantuan Asia

Kanada selama periode itu mengalir ke anggota Persemakmuran, dengan bagian terbesarnya adalah India dan Pakistan. Ketika CIDA memutuskan untuk memusatkan bantuan Kanada pada sekelompok negara tertentu, CIDA tetap sejalan dengan tradisi dengan memilih Malaysia sebagai negara konsentrasi pertama di Asia Tenggara. Tinjauan bantuan CIDA pertama, yang dilakukan pada tahun 1970, membuat keberangkatan dengan memilih Indonesia sebagai satu-satunya negara di Asia yang ditargetkan untuk peningkatan bantuan besar, dengan alasan bahwa ia telah menunjukkan "bukti kemampuannya untuk menyerap dan menggunakan peningkatan jumlah pembangunan bantuan." Indonesia adalah satu-satunya negara di luar Persemakmuran dan bekas imperium Prancis yang ditunjuk sebagai negara konsentrasi, dengan bantuan yang dijadwalkan melambung hingga \$ 8,75 juta pada 1971-72. Pada akhir tahun Trudeau, Indonesia berada di urutan kedua di antara penerima bantuan Kanada, hanya tertinggal Bangladesh. (Webster, Fire and the Full Moon: Canada and Indonesia in a Decolonizing World, 2010)

Kanada bergabung dengan Kelompok Antar-Pemerintah untuk Indonesia (IGGI), didirikan pada tahun 1967 untuk mengoordinasikan bantuan ke Indonesia, tetapi hanya sebagai pengamat. Itu adalah sumber kekecewaan bagi perencana Indonesia. Ketua Bappenas Widjojo dan wakilnya Emil Salim datang ke Ottawa setelah pertemuan IGGI kedua. Di sana mereka menunjukkan kepada para pejabat bahwa dukungan Kanada tidak terlalu penting untuk nilainya dibandingkan dengan suara kepercayaan simboliknya terhadap Orde Baru. Widjojo "menekankan nilai propaganda Pemerintah untuk dapat mengumumkan peningkatan bantuan asing," sementara Salim mengatakan bahwa bantuan Kanada "tidak dapat membantu tetapi memiliki efek psikologis pada

penduduk, akan mengekspresikan kepercayaan Kanada pada upaya Pemerintah Indonesia dalam rehabilitasi ekonomi dan dapat dilihat sebagai ungkapan minat Kanada di Indonesia. "Pertemuan ini diadakan hanya satu bulan setelah Trudeau mengambil alih sebagai perdana menteri, sehingga pejabat bantuan luar negeri yang hadir terus mencerminkan kebijakan yang dibentuk sebelumnya. Mereka dengan senang hati melanjutkan pelatihan teknis orang Indonesia di Kanada di sekitar level saat ini - dengan biaya sekitar \$ 200.000 pada tahun 1968-69 - dan mempertimbangkan untuk melaksanakan proyek bantuan modal hingga \$ 350.000. Ini adalah bantuan dalam skala yang lebih kecil daripada yang diperkirakan pada tahun 1957, ketika Louis St. Laurent masih perdana menteri. "Tampaknya orang luar sangat meremehkan gawatnya situasi di Indonesia," Salim mencatat dengan sedih.

Ketika Konservatif Brian Mulroney mengalahkan pemerintah Liberal pada tahun 1984, kebijakan luar negeri Kanada mengorientasikan dirinya kembali ke hubungan yang lebih baik dengan Amerika Serikat. Ide-ide seperti "opsi ketiga," yang sudah diremehkan, dibatalkan seluruhnya. Sesuai dengan bahasa pemerintahan Presiden AS Ronald Reagan, pemerintah Mulroney berbicara tentang hak asasi manusia. Dengan Joe Clark, mantan perdana menteri, sebagai Menteri Luar Negeri, pemerintah Mulroney mengambil garis retoris yang lebih lembut. Ini mengekspresikan simpati tradisional Kanada terhadap negara-negara berkembang, tetapi tidak menyimpang terlalu jauh dari kebijakan luar negeri Amerika kecuali pada isu-isu tertentu seperti apartheid di Afrika Selatan. Pemerintah juga bergerak untuk mengurangi pengeluaran bantuan dan untuk mengarahkan kembali beberapa bantuan untuk promosi perdagangan melalui Program Kerjasama Industri CIDA. Indonesia, bagaimanapun, tidak ditargetkan untuk pemotongan bantuan; Bisnis Kanada bahkan

mendapat tambahan \$ 4 juta untuk berekspansi di Indonesia melalui program perdagangan CIDA yang baru. 52 (Webster, Fire and the Full Moon: Canada and Indonesia in a Decolonizing World, 2010)

Kembali terpilihnya Suharto sebagai Presiden Indonesia tidak ada yang mengira ini adalah pemilihan bebas, tetapi mereka mengikuti bentuk demokrasi. Meskipun tingkat utang luar negeri Indonesia termasuk yang tertinggi pada saat itu, tingkat pertumbuhannya tampaknya membenarkan risikonya. Pada saat Mulroney berkuasa, total bantuan asing ke Indonesia lebih dari US \$ 15 miliar; pada tahun 1990, Indonesia adalah penerima bantuan asing terbesar di dunia dan peringkat ketiga di antara penerima bantuan Kanada. 54 Walaupun bantuan Kanada secara keseluruhan mulai turun dari puncaknya tahun 1978, dana yang ditujukan untuk Indonesia meningkat.

Dalam mengejar pembangunan, Orde Baru membuka pintu untuk investasi asing. Kanada bergabung dengan sekutu-sekutunya dalam perayaan kursus rezim baru, sebagian besar karena tahun-tahun itu menandai hasil dari banyak harapan tahun 1945 hingga 1963. Investor Kanada terbesar sejauh ini adalah Inco, yang dianugerahi kontrak untuk mengembangkan sebuah kompleks penambangan nikel di Sulawesi. Invasi Indonesia ke Timor Timur pada tahun 1975 tidak melakukan apa pun untuk membalikkan pelukan Ottawa terhadap Orde Baru di Ottawa. Dengan asumsi yang salah bahwa dekolonisasi Timor Lorosa'e adalah mustahil dan bahwa aturan Indonesia tidak dapat diubah, pembuat kebijakan berpendapat bahwa tindakan yang paling manusiawi adalah menerima aneksasi wilayah Indonesia oleh Indonesia. Indonesia menjadi negara konsentrasi untuk bantuan Kanada setelah tahun 1970. Bantuan luar negeri menandakan dukungan pemerintah Kanada untuk Indonesia Soeharto, tetapi

juga membantu mendorong pertumbuhan masyarakat sipil Indonesia. Organisasi-organisasi non-pemerintah berkembang biak dan mulai melakukan diplomasi publik mereka sendiri, menciptakan jaringan hubungan yang luas dengan negara-negara lain, termasuk Kanada. Kelompok-kelompok ini akhirnya menciptakan kondisi untuk jatuhnya Suharto dan pemulihan demokrasi pada tahun 1998. Ottawa resmi mendukung Suharto, tetapi masing-masing diplomat publik "telah menjalin hubungan yang kuat antara masyarakat sipil Kanada dan Indonesia yang pada akhirnya terbukti lebih penting. Tautan-tautan itu termasuk ikatan dengan para aktivis yang bekerja untuk kemerdekaan Timor Timur. Jaringan pendukung transnasional Timor Lorosa'e mampu menaikkan biaya politik dari dukungan pemerintah Kanada untuk pemerintahan Indonesia atas Timor Lorosa'e dan untuk menunjukkan bahwa pendudukan jauh dari tidak dapat dipulihkan. Mengingat bahwa, akhir Perang Dingin, dan krisis keuangan Asia 1998, pembuat kebijakan Kanada mengubah arah dan membantu penyelesaian dekolonisasi Timor Timur pada tahun 1999. (hal.194) (Webster, Fire and the Full Moon: Canada and Indonesia in a Decolonizing World, 2010)

Selama tiga puluh tahun antara 1967 dan 2007, Kanada memberikan bantuan kepada Indonesia dalam pengaturan koordinasi internasional yang didirikan di bawah *Inter-Governmental Group on Indonesia* dan *Consultative Group on Indonesia*. Sebagai mitra pembangunan, Kanada bekerja erat dengan Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengurangi kerentanan terhadap kemiskinan. *Canadian International Development Agency* (CIDA) mengelola program bilateral Kanada untuk bantuan pembangunan ke Indonesia hingga dilipat ke dalam Global Affairs Canada. CIDA menjadikan Indonesia sebagai "negara konsentrasi" utama bagi kerja sama pembangunan Kanada, dengan

Indonesia menempati peringkat kedua sebagai penerima bantuan Kanada pada 1980-an. Dukungan Kanada untuk pembangunan Indonesia berlanjut di tingkat yang lebih rendah.

Sebagai negara terpadat keempat dan demokrasi terbesar ketiga, Indonesia telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan yang telah menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pengeluaran publik untuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Namun, kemiskinan yang signifikan masih ada, khususnya di Indonesia Timur, dan sekitar 40% populasi Indonesia hidup dengan kurang dari US \$ 2 sehari dan tetap rentan terhadap guncangan ekonomi. Walaupun Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman hayati teratas di dunia, Indonesia adalah salah satu penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi, dan rentan terhadap perubahan iklim dan bencana alam.

Mayoritas penduduk miskin Indonesia masih tinggal di daerah pedesaan. Sekitar 35% orang Indonesia bergantung pada pertanian untuk pendapatan mereka. Indonesia menempati peringkat 113 dari 188 negara dalam *United Nations Development Programme's 2016 Human Development Index*. Kesenjangan gender adalah tantangan yang signifikan, dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, tingginya tingkat pernikahan dini dan anak yang terkait dengan tingginya angka kematian ibu di negara itu. Perempuan terus terkonsentrasi di segmen ekonomi dengan upah rendah dan bernilai rendah dengan akses terbatas ke sumber daya keuangan.

Indonesia, demokrasi multi-partai yang relatif baru tetapi bersemangat, telah mengadakan beberapa pemilihan damai dan sah sejak ia muncul dari pemerintahan otoriter pada tahun 1998. Fitur utama dari

sistem demokrasi Indonesia adalah desentralisasi kekuatan signifikan dari pusat ke 33 provinsi dan 497 kabupaten. Reformasi desentralisasi telah melampaui kapasitas pemerintah daerah untuk memberikan layanan sosial, yang tetap tidak memadai oleh standar negara berpendapatan menengah.

Sektor swasta memainkan peran dominan dalam perekonomian Indonesia. Ekonomi formal sebagian besar terdiri dari konglomerat bisnis, perusahaan milik negara dan investor asing (terutama di sektor ekstraktif). Diperkirakan 70% dari sektor swasta Indonesia adalah milik sektor informal, yang dicirikan oleh sejumlah besar usaha mikro, kecil dan menengah. Perempuan merupakan 65% dari perekonomian informal.

Berdasarkan adanya permasalahan yang dimiliki oleh Indonesia tersebut, Kanada akan mendukung pemerintah untuk membantu Indonesia dalam menghadapi permasalahan yang ada. Bantuan yang diberikan oleh Kanada kepada Indonesia yakni bertujuan untuk: (1) merangsang pembangunan ekonomi dengan menerapkan kebijakan nasional untuk pembangunan ekonomi lokal dan regional; (2) menghasilkan dan mengelola pendapatan melalui perpajakan dan royalti; (3) pengadaan barang dan jasa; (4) mengelola keuangan publik secara transparan dan responsif gender; (5) mengurangi hambatan perdagangan dan investasi. Kanada juga akan menjajaki peluang untuk mendukung lingkungan peraturan untuk kemitraan publik-swasta dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Itu termasuk mendukung penyediaan bantuan teknis untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan tentang penggunaan sumber daya alam, baik yang tidak dapat diperbarui maupun yang dapat diperbarui. (Canada, 2017)

Hasil utama yang diantisipasi oleh pemerintah Kanada terhadap bantuan yang diberikan kepada Indonesia yakni; (1) peningkatan kapasitas pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum, peraturan, sistem, dan implementasi yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi nasional dan lokal yang stabil; (2) memperkuat kapasitas keuangan dan manajemen sektor publik yang responsif gender di tingkat lokal, regional, dan nasional. (3) peningkatan kapasitas institusi lokal, regional dan nasional untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. (Canada, 2017)